IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SD NEGERI 02 WIRADESA KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

Untung Widodo, 17 Agustus University, Semarang, Indonesia

PUBLIC POLICY INTERNATIONAL CONFERENCE (PPIC)

**Shaping Indonesia's Future: Empowering Human Resources to Create
Quality Public Policies and Welcoming All Parties**

UNTAG Semarang, Indonesia

Abstrak

Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pernah diujicobakan pada Tahun 2004. Apakah Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Dalam peningkatan Mutu SD Negeri 02 Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SD Negeri 02 Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan juga faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan triangulasi, wawancara, observasi, dan studi dokumen sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SD Negeri 02 Wiradesa Kabupaten Pekalongan sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan berdasar pada observasi dan wawancara yang dilakukan, pada beberapa faktor yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yakni Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Kata kunci: Implementasi kebijakan kurikulum 2013.

I. PENDAHULUAN

Kurikulum menurut UU No.20 Tahun 2003 telah menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional, didalamnya mencakup rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Senada dengan hal itu, Nana Sudjana (2006), juga mengemukakan bahwa Kurikulum merupakan niat & harapan yang dituangkan kedalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah.

Sejak Indonesia merdeka kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1947, tahun 1952, tahun 1964, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 2004, tahun 2006, dan sekarang yang sedang diimplementasikan yaitu kurikulum 2013, kurikulum yang baru dan diimplementasikan tergesa-gesa pasti mendapatkan berbagai respon, baik itu respon positif atau negatif dari pihak yang menjalankan. Pihak-pihak tersebut diantaranya sekolah-sekolah di wilayah kabupaten Pekalongan yang melaksanakan kurikulum 2013 (kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua/wali) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter (competency and character based curriculum). Kurikulum berbasis karakter dan kompetensi diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara efektif, efisien, dan berhasil guna. Oleh karena merupakan langkah yang positif ketika pemerintah merevitalisasi pendidikan karakter dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan, termasuk dalam pengembangan Kurikulum 2013.

Pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Sesuai dengan standart kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis karakter sekaligus berbasis kompetensi, dengan pendekatan tematik dan kontekstual diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

II. Hasil Penelitian

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975),identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan– tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun demikian, ada beberapa kasus yang terkesan sulit dalam mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu: pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan dan kontradiksi dalam pernyataan ukuran dan tujuan kebijakan. “Mewujudkan pendidikan berkarakter dan berkompentensi” Bapak Drs Muh. Mustofa,M.Si selaku Korwil Kecamatan Wiradesa Bidang Pendidikan Kab.Pekalongan mengatakan bahwa: “Lahirnya kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP 2006 adalah untuk meningkatkan dan pendidikan berkarakter bagi para siswa. Ini adalah program nasional, merupakan tanggung jawab bersama, jadi apa yang ditekankan di kurikulum 2013 harus kita jalankan dengan baik.

(Wawancara tanggal 2 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, selaku Korwil Wiradesa beliau menjelaskan bahwa inti dari lahirnya kurikulum 2013 adalah untuk melahirkan siswa yang berkarakter. Selain itu, tanggung jawab bersama yang diemban dalam mewujudkan tujuan kurikulum 2013 menjadikan semua pihak harus terlibat dalam menyukseskan program pemerintah tersebut. Sonhaji ,S.Pd.I selaku Guru Senior Sekolah Dasar Negeri 02 Wiradesa, mengungkapkan hal senada yang mengatakan bahwa: “berbicara tujuan kurikulum 2013, yang saya tahu itu program bertujuan untuk mewujudkan pendidikan karakater, jadi memang yang mau dibangun dari siswa itu adalah perilakunya. Karena waktu saya dulu memang betul-betul itu kita takut sama guru dan hormat, tapi sekarang anak-anak itu biasa kurang ajar sama gurunya. Intinya mungkin itu yang mau di perbaiki oleh pak menteri anies baswedan dulu. siswa itu tidak hanya dituntut untuk cerdas dari segi pelajaran tapi juga yah perilakunya juga harus baik dalam kesehariannya. (Wawancara tanggal , 3 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari program ini yakni membangun karakter peserta didik dalam kesehariannya, tidak hanya pintar dalam kelas namun juga harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Melihat fenomena sekarang dengan semakin menurunnya moral para peserta didik dari hari kehari, menjadikan pemerintah membuat strategi baru dengan melahirkan pola pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap melalui kebijakan kurikulum 2013. Hal. Ini juga diperjelas oleh

salah satu guru yang mengajar di SD Negeri 02 Wiradesa, Srituti, S.Pd.SD selaku guru senior mengajar di SD Negeri 02 Wiradesa, mengatakan bahwa: “Tujuan dibentuknya kurikulum 2013 adalah untuk membangun karakter siswa, nah ini bedanya. Kalau dulu KTSP yang ditekankan adalah kognitif siswa yang dinilai dengan angka-angka, sekarang dengan kurikulum 2013 betul-betul siswa dituntut untuk sadar dan mencari tahu sendiri kalau misalkan ada materi yang tidak ditahu dan bisa berekreasi dengan bidang studi yang diminati. Guru hanya sebatas memfasilitasi saja kepada siswa. Intinya memang karakter yang mau dibangun disini. (Wawancara tanggal 5 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat dikatakan bahwa lahirnya kurikulum 2013 di tingkat sekolah dasar bertujuan untuk melahirkan pesertadidik yang berkarakter dan berkompetensi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dari proses belajar mengajar di SD Negeri 02 Wiradesa, terlihat bahwa dalam proses pembelajaran siswa selalu dibarengi dengan pendidikan karakter sebelum mengawali ataupun sedang berlangsungnya proses pembelajaran, seperti budaya cium tangan antara guru dengan para siswa di pagi hari, kelas bersih setiap hari, guru yang seringkali mengajarkan sopan santun di sela-sela pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang berlangsung seperti pelajaran agama dan pkn, sebelum pulang juga siswa kembali mencium tangan dan pamit kepada semua guru ataupun staff sekolah. Namun dilain hal ditemukan bahwa dari semua guru yang mengajar terdapat satu guru yang kurang memahami apa tujuan kurikulum 2013 yakni guru kelas III, pada saat dilakukan wawancara, kembali bertanya kepada peneliti dan guru yang berada disampingnya tentang tujuan pemerintah memberlakukan kurikulum tersebut. Hal yang seperti ini menandakan bahwa semua agen pelaksana belum begitu memahami tujuan dari kebijakan pemerintah namun sudah menjalankannya.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu maksud yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang cukup dan memadai, implementasi suatu kebijakan akan terganggu dan menjadi agak sulit untuk dilaksanakan. Sumber daya yang ada pada pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah cukup dan memadai sesuai dengan apa yang tertera di dalam peraturan. Selain itu, pihak pembuat dan pelaksana kebijakan harus menggunakan sumber daya secara cermat dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan.

C. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan ini. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan van Horn (1975) menyetujui beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan

Kesimpulannya adalah karakteristik dari SD Negeri 02 Wiradesa dalam pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh beberapa pihak yang terkait seperti pihak pemerintah daerah (bupati) yang menyediakan anggaran pelatihan kepada guru dengan sistem kuota sekolah, dinas pendidikan kabupaten yang mengawal kebijakan dengan membentuk pengawas dan instruktur kurikulum untuk diutus ke sekolah-sekolah termasuk SD Negeri 02 Wiradesa, Korwil kecamatan Wiradesa Bidang Pendidikan yang berperan sebagai pihak perwakilan dinas pendidikan kabupaten juga melakukan koordinasi langsung dengan sekolah serta internal sekolah sendiri. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti juga ditemukan bahwa sejak berubah status menjadi sekolah inti, SD Negeri 02 Wiradesa belakangan ini kebanyakan melakukan sosialisasi secara sendiri karena dianggap telah mampu untuk mandiri. Sehubungan dengan itu, maka pihak lain seperti dinas pendidikan hanya sebagai pengawal kebijakan apabila pihak sekolah menemui kendala selama menjalankan kebijakan tersebut.

D. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Adanya elemen-elemen yang saling membantu untuk pengimplementasian sebuah kebijakan tidaklah cukup apabila koordinasi diantara organisasi yang terlibat tidak maksimal. Komunikasi antar organisasi harus terjalin dengan baik apabila sebuah kebijakan ingin terimplementasikan dengan optimal. Aktivitas yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan harus dilakukan secara bersama-sama agar tingkat hambatan dan kesulitan saat proses implementasi semakin kecil.

Begitu halnya dalam kasus ini, SD Negeri 02 Wiradesa sebagai salah satu agen pelaksana dalam kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar di kab. Pekalongan, tentunya tidak mampu untuk melaksanakannya sendiri. Oleh karena itu, SD Negeri 02 Wiradesa bekerja sama dengan beberapa elemen lain seperti, Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan, korwil kec. Wiradesa Bidang Pendidikan kab.

Pekalongan, Pengawas SD, komite sekolah, serta stakeholder dari SD Negeri 02 Wiradesa sendiri. Untuk memastikan mengenai bentuk komunikasi antar organisasi dari SD Negeri 02 Wiradesa dengan elemen yang lainnya, maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah tersebut dan beberapa pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan ini. Adapun pendapat beberapa guru SD Negeri 02 Wiradesa yang mengatakan bahwa: “kebanyakan sekarang informasi lewat Via WA saja ataupun telfon dan SMS, jadi kalau ada informasi biasa di upload saja di grup WA supaya para kepala sekolah dan pihak Korwil, mengetahui semua kalau ada informasi rapat dan lainnya, ini grup WA Korwil Kec. Wiradesa kemarin saya yang bentuk. Adapaun kalau misalkan rapat internal itu biasa secara lisan saja karena seperti rapat dengan guru ataupun ketua komite” (Wawancara tanggal 7 September 2021) Berdasarkan wawancara diatas, beliau menyatakan bahwa kebanyakan informasi yang diperoleh berasal dari media sosial dengan via obrolan grup WA ataupun lewat via telfon dan SMS antara pihak dinas pendidikan, Korwil Kecamatan Wiradesa Bidang Pendidikan dan para kepala sekolah. Beliau juga termasuk admin grup Whatsapp Korwil Kecamatan Wiradesa Bidang Pendidikan, hal ini agar informasi yang diterima bias seragam dan terutama jika ada rapat, sedangkan rapat internal dengan pihak komite sekolah dan para guru biasa hanya menggunakan media komunikasi langsung, baik dalam bentuk penyampaian informasi rapat ataupun proses rapat. Pendapat lain juga ditemukan dari Korwil kecamatan Wiradesa yang mengatakan bahwa: “seperti yang saya katakan sebelumnya, supaya informasi tepat sasaran dan seragam, maka kita hadirkan kepala sekolah dan adakan pelatihan guru dulu sebagai bentuk informasi awal, dan kalau dalam bentuk komunikasi dan pengawasan yang kami lakukan itu melalui perwakilan pengawas/instruktur saja, itupun pihak dinas pendidikan biasanya turun tangan kalau mau diadakan pelatihan kurikulum 2013, sekarang juga teknologi sudah maju, jadi kalau misalkan ada informasi ataupun ada yang tidak tahu oleh guru itu lewat internet saja. Istilahnya kami menyerahkan hampir sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk mengembangkan sekolahnya, kecuali ada informasi langsung dari pusat seperti saat awal keluarnya kebijakan kurikulum 2013 di Pekalongan, memang SD Negeri 01 Pekuncen yang ditunjuk pertama di kecamatan Wiradesa, dan itu langsung kebijakan pusat melalui dinas pendidikan kabupaten untuk diinformasikan kepada pihak sekolah atas kebijakan tersebut” (Wawancara tanggal 2 September 2021)

Berdasarkan wawancara diatas, beliau menyatakan bahwa agar informasi tentang kebijakan kurikulum 2013 tersebut seragam, maka pihak dinas pendi dikan melakukan pertemuan awal dengan kepala sekolah masing-masing dan melakukan pelatihan sebagai bentuk tindak lanjut penyampaian informasi. Adapaun bentuk komunikasi melalui pihak pengawas ataupun instruktur yang dibentuk oleh dinas

pendidikan kabupaten Pekalongan diadakan dengan memberikan pelatihan ataupun kunjungan langsung ke sekolah dilain hal, Pihak dinas pendidikan juga mengaku menyerahkan hampir secara keseluruhan kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan sendiri pola pelaksanaan kurikulum 2013 ini, dan dinas pendidikan hanya berlaku sebagai pengawal kebijakan apabila dalam proses pelaksanaannya pihak sekolah menemui kendala. Keseragaman informasi yang diterima mengenai kurikulum 2013 juga sama dengan indikator yang pertama, karena menggunakan media yang sama (Media sosial). Kecuali saat awal keluarnya kebijakan tersebut, pihak dinas pendidikan langsung mengadakan pertemuan dengan sekolah yang ditunjuk sebagai bentuk penyampaian awal.

2. Kegiatan Pelaksana

Hubungan-hubungan antar organisasi maupun antar pemerinah ada dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif. Selain itu keberhasilan kurikulum 2013, menuntut para kepala sekolah yang demokratis dan professional, sehingga mampu menumbuhkan iklim demokratis di sekolah, yang akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi terciptanya kualitas pendidikan dan pembelajaran yang optimal untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik.

Kepala sekolah yang mandiri, demokratis, dan professional harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik kepada para tenaga pendidikny.

1). Pembinaan Mental, Mental yang ditanamkan kepada para tenaga pendidik berkaitan dengan sikap batin dan watak. Dalam hal ini kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif agar setiap tenaga pendidikny dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, secara professional dan proporsional. Upaya tersebut dapat terwujud apabila tenaga kependidikan dilengkapi dengan sarana dan prasarana mengajar yang lengkap serta bekerja sama dengan komite sekolah dalam menggandeng masyarakat untuk ikut memikirkan pendidikan di sekolah terutama yang menyangkut masalah pendanaan. Sarana penunjang untuk pembelajaran belum lengkap, Namun dari segi pembiayaan tidak pernah cukup karena terkadang dana yang dicairkan dari pusat tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Sedangkan untuk proses belajar mengajar, kepala sekolah menyerahkan wewenang kepada guru untuk mengajar dan memanfaatkan sarana yang ada; tidak hanya itu dalam menyukseskan program ini pihak sekolah juga menggandeng masyarakat melalui perwakilan komite sekolah untuk turut serta berpartisipasi dalam pendidikan.

Kepala sekolah sudah cukup bagus dalam memimpin, biasa diberi nasihat kepada para guru apabila ada hal-hal yang tidak sesuai. Sedangkan dari segi sarana penunjang seperti alat peraga biasanya di buat sendiri oleh guru dan siswa, buku sudah cukup lengkap namun masih kurang sarana internet dan akses jaringan yang masih terbatas, sehingga apabila ada yang membutuhkan internet biasa terkendala.

Selain itu guna menambah wawasan para siswa, biasa mereka diperkenalkan dengan dunia luar yang relevan dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung, misalnya kunjungan ketempat pembudidayaan rumput laut pada mata pelajaran IPA. Beliau juga memperjelas bahwa guna mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, biasa diadakan rapat rutin dengan komite sekolah dan beberapa tokoh masyarakat. Sarana penunjang dalam pembelajaran sudah cukup memadai, jika ada sarana seperti alat peraga yang tidak ada, biasanya diadakan sendiri oleh guru dengan cara membuatnya dengan para siswa, seperti bangun ruang untuk bidang studi matematika. Dari beberapa informan diatas dan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa sarana penunjang dalam pembelajaran sudah cukup memadai dari segi alat peraga, hal ini diperoleh berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi tiap ruang kelas, dan hamper keseluruhan kelas dilengkapi dengan alat peraga untuk menunjang proses belajar mengajar, namun masih terkendala dari akses jaringan, hal ini kembali diperoleh dengan memeriksa situs wifi yang tidak ditemukan oleh peneliti ketika melakukan observasi. Sedangkan dalam hal kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat, sekolah mengadakan rapat komite sekolah dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat dan orang tua siswa yang dianggap mampu untuk member sumbangsi pemikiran dalam menyukseskan pendidikan terutama keikutsertaan masyarakat serta tuntutan kurikulum 2013 dalam kurun 3 bulan sekali.

2). Pembinaan Moral

Pembinaan moral berkaitan dengan ajaran baik dan buruk mengenai suatu perbuatan, sikap dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga kependidikan. Dalam hal ini Guru Senior SD Negeri 02 Wiradesa Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, salah satu guru SD Negeri 02 Wiradesa mengatakan bahwa: “kalau saya pribadi melihat kepala sekolah, bagus caranya memimpin karena biasa memberi nasehat kepada kami. Memimpin dengan demokratis Kalau kepada siswa biasa penuh kelembutan karena sekarang ini beda kondisinya dengan yang dulu. Biasa siswa Cuma di nasehati saja,, padahal kan guru niatnya baik untuk mendidik. dengan dikota karena betul-betul itu siswa dilimpahkan sepenuhnya sama guru, biasa orang tua kurang memperhatikan anaknya untuk belajar dirumah. Jadi pembentukan moralnya itu kurang lengkap karena hanya bersumber dari guru (Wawancara tanggal 8 September 2021) Berdasarkan

wawancara diatas, beliau menyatakan bahwa kepala sekolah sudah bagus dari segi kepemimpinannya karena biasa kepala sekolah memberi nasihat kepada para guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dari pihak siswa, guru tidak bisa melakukan tindakan kekerasan apabila ada yang melanggar karena terkadang ada orang tua yang keberatan. Jadi guru hanya sebatas menasihati apabila ada siswa yang melanggar. Dari guru yang lain dalam hal ini Abdul Salim,S.Pd. juga mengungkapkan hal senada yang mengatakan:“kalau saya pribadi melihat kepala sekolah cukup bagus caranya memimpin, biasa kalau ada guru yang telat datang biasa dikasih nasihat supaya bisa datang lebih cepat lagi, (Wawancara tanggal 12 September 2021)

Berdasarkan wawancara diatas, beliau menyatakan bahwa kepala sekolah cukup bagus memimpin para guru dan staffnya. Biasa beliau memberi nasihat kepada guru yang datang terlambat untuk mengajar lebih tepat waktu dan disiplin dalam menjalankan tugas. Berdasarkan pernyataan dari kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah dari segi kepemimpinan sudah cukup bagus, karena terkadang memberikan teguran kepada gurunya apabila ada yang datang terlambat mengajar.

3). Pembinaan Fisik, Pembinaan fisik yang berkaitan dengan peningkatan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan mereka secara lahiriah sebelum melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Karena dibalik fisik yang sehat terdapat jiwa yang kuat pula, dan hal ini secara sadar tersinkronisasi secara berkesinambungan dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini kepala SD Negeri 02 Wiradesa sebagai pemimpin sekolah yang bertugas untuk menciptakan kondisi tersebut kepada para tenaga pendidiknya. Berdasarkan wawancara diatas, kepala sekolah menyatakan bahwa aktifitas fisik yang biasa dilakukan guru adalah senam pada hari sabtu. Namun sejak guru olahraga tidak ada, aktifitas tersebut sudah jarang dilakukan dan bahkan sudah beberapa bulan tidak pernah lagi diadakan. Berdasarkan wawancara diatas, beliau kembali menyatakan bahwa biasa diadakan senam pada hari sabtu pagi antara guru dengan para siswa. Dari kondisi kesehatan para guru beliau menuturkan bahwa tidak ada guru yang bermasalah dengan kesehatan, sehingga semua dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dari hasil wawancara dari kedua informan diatas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pembinaan fisik yang biasa diadakan oleh pihak sekolah adalah senam pagi tiap hari sabtu, namun sejak tidak adanya guru olahraga maka aktivitas tersebut belakangan ini tidak terlaksana. Hal ini dibuktikan pada saat observasi yang dilakukan oleh peneliti, dimana selama proses penelitian, peneliti tidak pernah menemukan SD Negeri 02 Wiradesa mengadakan senam pagi.

4). Pembinaan Artistik, Dalam hal ini, artistik berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Hal ini biasanya dilakukan dengan kegiatan karya wisata yang bisa dilaksanakan setiap akhir tahun ajaran. Dalam hal ini kepala sekolah harus mempunyai perencanaan khusus untuk kegiatan tersebut. Kegiatan ini seringkali dianggap buang-buang waktu, financial pribadi dan sekolah serta tenaga, padahal pada awalnya kegiatan yang seperti ini mampu untuk meningkatkan gairah dan motivasi tenaga pendidik untuk melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan imajinatif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini kepala sekolah SD Negeri 02 Wiradesa selaku pemimpin memiliki kewajiban untuk mewujudkan hal tersebut kepada para tenaga pendidiknya,

Pihak sekolah menyatakan bahwa bentuk pembinaan artistik seperti rekreasi biasa diadakan satu tahun sekali, dan hal tersebut hanya untuk kelas VI yang telah melaksanakan ujian nasional. Adapun bentuk rekreasi yang lain, biasanya hanya inisiatif guru untuk membawa siswanya keluar agar lebih mengenal alam. Pendapat tersebut juga senada dengan pernyataan Sri Tuti, S.Pd.SD selaku guru senior di SD Negeri 02 Wiradesa yang menambahkan bahwa: “biasa diadakan rekreasi tiap selesai ujian nasional, tapi itu secara keseluruhan karena biasa kita bersama siswa keluar kalau sudah diadakan ujian nasional, istilahnya bentuk refreshing setelah usai pembelajaran satu semester. Tapi seperti yang saya katakan bahwa biasa juga anak-anak wali saya bawa keluar kalau pelajaran IPA, misalnya keluar ke tempat budidaya rumput laut. Jadi selain untuk mengenalkan anak-anak tentang alam dan pembelajaran biasa juga sebagai ajak rekreasi mi, tuturnya” (Wawancara tanggal 7 September 2021)

Berdasarkan wawancara diatas, beliau menyatakan bahwa bentuk Rekreasi yang diadakan untuk guru dan siswa oleh pihak sekolah adalah kunjungan keluar, untuk kelas VI yang selesai melaksanakan PTS semester II ada masa jeda dikhususkan untuk refreshing, namun untuk adik kelasnya kelas I-V kunjungan keluar lebih diprioritaskan untuk belajar, dan refreshing hanya menjadi tujuan kedua dan itu berlaku antara guru dan siswa. Jadi semuanya sama-sama belajar dan rekreasi. Pendapat lain juga ditemukan dari hasil wawancara dengan ibu Sunarti, S.Pd.SD yang mengatakan bahwa: “biasa diadakan rekreasi keluar pak, misalnya di tempat permandian alam kalau selesai PTS semester II kelas VI. Ke Yogyakarta dengan obyek wisata Candi dan Museum Yogya, pernah juga mengajak siswa kelas 6 ke Bandung Kalau untuk kelas I-V biasa diadakan acara makan-makan kalau sudah semester dan mau libur panjang, Ujarnya” (Wawancara tanggal 5 September 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, beliau menyatakan bahwa bentuk rekreasi yang biasa diadakan adalah keluar sekolah. Adapun bentuk rekreasi didalam sekolah adalah acara makan bersama tiap selesai ujian semester dan menjelang libur

panjang. Dari ketiga informan diatas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa bentuk pembinaan artistik yang diadakan pihak sekolah adalah rekreasi untuk kelas VI yang telah selesai melaksanakan PTS Semester II, dan untuk kelas I-V bentuk pembinaan artistik yang dilakukan adalah kunjungan ketempat-tempat yang menunjang proses belajar seperti tempat budidaya tanaman dan lainnya, sementara rekreasi yang dilakukan didalam sekolah adalah acara makan bersama antara para guru dengan siswa tiap selesai ujian semester dan menjelang libur panjang. Hal ini diperkuat dengan temuan peneliti pada saat observasi, dimana pada saat itu peneliti diundang untuk datang kesekolah keesokan harinya dan ikut serta dalam acara makan bersama tersebut.

Dari keempat indikator tersebut apabila semuanya terlaksana dengan baik dalam lingkup sekolah, maka akan menunjang keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013. Dan secara umum dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 02 Wiradesa telah melaksanakan keempat indikator tersebut, walaupun masih banyak hal lain yang bisa menunjang indikator ini , namun setidaknya sekolah ini telah melaksanakan sebagian dari indikator aktivitas pelaksana tersebut.

E. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dan tidak kalah penting adalah lingkungan eksternal yang ada dalam penerapan suatu kebijakan. Lingkungan eksternal memang membawa pengaruh dalam implementasi kebijakan besar maupun kecil. Apabila lingkungan eksternal tidak kondusif maka akan menjadi faktor penyebab dari kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kekondusifan lingkungan eksternal harus pula diperhatikan agar pengimplementasian kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik. Salah satu kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah lingkungan kondusif-akademik. Lingkungan eksternal sekolah yang aman, nyaman dan tertib merupakan iklim yang dapat membangkitkan nafsu, gairah dan semangat dalam proses pembelajaran. Iklim yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri dalam proses pembelajaran diantaranya kondisi ekonomi yang memadai, politik yang stabil serta lingkungan sosial masyarakat setempat dalam menunjang dan mendukung pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SD Negeri 02 Wiradesa ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa elemen terkait

III. Kesimpulan

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri 02 Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sudah cukup baik dan telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan berdasar pada beberapa

faktor yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yakni: Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana, Lingkungan sosial politik maka tujuan kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh stakeholder baik guru maupun kepala sekolah SD Negeri 02 Wiradesa. Respon sekolah terhadap Implementasi kurikulum 2013 sangat baik, dengan memfasilitasi Sumber daya (manusia, finansial, dan waktu) sudah sangat baik namun masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti: tenaga pengajar pada bidang studi dan guru kelas, dari sisi pencairan anggaran dana BOS terkadang tidak sesuai dengan jadwal penerimaan, serta kendala waktu pada saat penilaian hasil belajar tiap semesternya yang menggunakan waktu yang cukup lama. Karakteristik agen / badan pelaksana, jika dilihat dari faktor ini juga sudah cukup baik, karena SDN 02 Wiradesa melakukan kordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, seperti dinas pendidikan, Korwil Kecamatan Wiradesa bidang pendidikan, pihak pemerintah, dan bahkan masyarakat juga ikut serta dilibatkan. Indikator lainnya seperti, Sikap, kecenderungan para pelaksana, dari faktor ini juga sudah cukup baik karena para pelaksana tidak ada yang menolak kebijakan ini, bahkan dinas pendidikan dan Korwil Kecamatan Wiradesa bidang pendidikan, turut serta mengawal kebijakan tersebut. Namun karena kurangnya pelatihan yang diadakan secara berkala oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah sendiri, maka para guru cenderung belajar dan menggali informasi secara mandiri. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, jika dilihat komunikasi yang terjalin antara dinas pendidikan, Korwil Kecamatan Wiradesa bidang pendidikan, dan pihak sekolah sudah cukup baik, namun bentuk komunikasi antar masyarakat masih kurang karena hanya dilakukan rapat komite selama 6 bulan sekali dan itupun sebagian kecil masyarakat yang terlibat. Sedangkan dari segi aktivitas pelaksana, kepala sekolah SD Negeri 02 Wiradesa telah melaksanakan pembinaan mental, moral, fisik dan artistik pada guru dan siswa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Andi Al Fatih. 2010. Implementasi Kebijakan dan pemberdayaan Masyarakat.
Bandung: UNPAD Press
- B Miles, Matthew, Dan Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kuantitatif.
Terjemahan Teecep Rohendi. Jakarta : UI Press

- Bruch, J.G. 1992 (edisi revisi. System, Analysis, Design, And Implementation. Boyd & Fraser Publishing Company
- Chamisijatin, Lisa, dkk. 2008. Pengembangan Kurikulum SD. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Dunn, William N. 2001. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Bahasa Indonesia). Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Dwijowijoto, Rian Nugroho, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : PT Elek Media Komputindo
- Endah Poerwati, Loeloe 2013. Panduan Memahami Kurikulum 2013. Jakarta : Prestasi Pustaka
- Fermana. 2009. Kebijakan publik, Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogyakarta : Arruss Media
- Marbun. B.N. 2007. Kamus Manajemen. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Roesdakarya
- Mulyasa, Enco 2013. Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung : Remaja Roesdakarya
- Nawawi. 2009. Public Policy. Bandung : Putra Media Nusantara
- Poewadarminta. 2009. Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka
- Soeharto. 2008. Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional. Jakarta : Erlangga
- Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.

ST, Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta :

Graha Ilmu

Thoha Miftah, 2009. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Kencana

Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang

Standar Isi Kurikulum 2013

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang

Standar Proses